BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang memiliki makna suka menurut (perintah dan sebagainya), taat (pada perintah, aturan dan sebagainya), dan disiplin. Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika wajib pajak memenuhi segala kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya dengan benar dan sesuai ketentuan. Pendapat tersebut senada dengan Harinurdin (2009) yang menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan dan melaporkan penghasilan yang diterimanya secara jujur dan benar.

Menurut Nurmantu (2003), ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan, termasuk mengenai ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran pajak terutang. Selanjutnya, kepatuhan material adalah suatu kondisi ketika wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang–undang perpajakan.

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak memiliki kewajiban mengisi SPT dengan jujur, baik, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan.

Siat & Toly (2013) dalam penelitiannya menyebutkan faktor - faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak antara lain:

1. Faktor kesadaran perpajakan

Kesadaran pajak dapat diartikan sebagai sikap untuk berkontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha patuh terhadap peraturan yang berlaku dan dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Kesadaran perpajakan dapat ditandai dengan mengetahui fungsi pajak dan kesadaran untuk membayar pajak.

2. Faktor petugas pajak

Petugas pajak atau fiskus diharapkan simpatik, mudah dihubungi, bekerja dengan jujur dan bersifat membantu. Sikap dari petugas pajak juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat mendorong kepatuhan perpajakan dengan memberikan pelayanan secara professional dan bantuan dengan baik. Selain itu, sikap tidak arogan dan penuh pengertian juga penting dalam menjadi petugas pajak.

3. Faktor hukum pajak

Faktor hukum pajak adalah pengetahuan dari wajib pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakan. Pengetahuan masyarakat yang terbatas dan juga adanya perubahan-perubahan terhadap peraturan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4. Faktor sikap rasional

Bentuk sikap rasional ini adalah pertimbangan wajib pajak atas untung dan rugi dari memenuhi kewajiban perpajakannya dan hal ini dapat ditunjukkan dari pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan jika tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

Soeparman (1964, dikutip dalam Mustaqiem, 2014) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan oleh pemerintah dalam bentuk uang atau barang berdasarkan norma–norma hukum dengan tujuan menutup biaya produksi barang–barang dan jasa–jasa kolektif dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum. Selanjutnya, Adriani (2005, dikutip dalam Mustaqiem, 2014) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan yang terutang oleh yang membayarnya dan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran kepentingan umum serta untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya definisi pajak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP). UU KUP menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, terdapat unsur–unsur yang melekat dalam pengertian pajak tersebut, yakni:

1. Pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib berdasarkan undang–undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak; dan
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran pemerintah untuk kepentingan umum

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Indonesia menggunakan beberapa sistem. Isroah (2013) menyebutkan bahwa terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding assessment system*.

Sistem yang pertama ialah *official assessment system*. Sistem ini memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak (skp) dikeluarkan oleh fiskus.

Sistem yang kedua ialah *self assessment system*. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Pada sistem ini, wajib pajak berperan aktif dan fiskus bertugas untuk mengawasi.

Sistem yang ketiga ialah *withholding assessment system*. Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Pajak penghasilan diatur berdasarkan Undang–undang. Undang–Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Pajak Penghasilan). UU Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Menurut Zulvina (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis dari dalam atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan. Selaras dengan pendapat itu, Supramono & Damayanti (2010) menyatakan bahwa pajak penghasilan merupakan pungutan resmi yang dipungut kepada orang-orang yang berpenghasilan atau terhadap penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21, dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan luar negeri lainnya (Mustaqiem, 2014). Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 23

adalah WPDN dan BUT. Selanjutnya, UU Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa PPh Pasal 23 merupakan pajak atas penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa dan imbalan sehubungan dengan jasa selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

PPh Pasal 23 dipotong dengan *withholding system*. Pemotong PPh Pasal 23 antara lain:

1. Badan pemerintah;
2. Subjek pajak badan dalam negeri;
3. Penyelenggara kegiatan;
4. Bentuk usaha tetap;
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
6. Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembayaran berupa sewa, yakni:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; atau
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menyelenggarakan pembukuan.

Sesuai UU PPh Pasal 23, terdapat dua objek pemotongan PPh Pasal 23 yang memiliki tarif yang berbeda, yakni 15% dan 2%. Jika pihak yang dipotong tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan dikenai tarif 100% lebih tinggi. Penjelasan mengenai objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen atau bagian laba kepada badan
 - b. Bunga, selain bunga yang diperoleh dari bank
 - c. Royalti atau imbalan atas penggunaan atas hak
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya (selain yang telah dipotong PPh Pasal 21)
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
 - b. Imbalan jasa sehubungan dengan jasa teknik, jasa konsultan, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa lain yang diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015

Pemotongan pajak penghasilan oleh pemotong pajak, terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran, disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung pada peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Selanjutnya, penyetoran PPh pasal 23 dilakukan oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dilakukan pemotong pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika batas jatuh tempo penyetoran atau pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan tanggal merah termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan PPh Pasal 23 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 harus

memberikan bukti potong kepada orang pribadi atau badan yang dipotong pajaknya (Mustaqiem, 2014).

2.4 Penelitian Terdahulu

Daffid (2019) melakukan penelitian di Lahat untuk meninjau kepatuhan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 masih kurang baik. Selain itu, terdapat beberapa hal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yakni sanksi administrasi berupa denda dan pengetahuan wajib pajak yang masih rendah.

Allagan (2021) melakukan penelitian di Binjai untuk meninjau kepatuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, wajib pajak kurang mengetahui kewajiban untuk pelaporan dan penyetoran serta wajib pajak lupa akan kewajibannya karena sifat PPh 23 yang tidak rutin. Selain itu, penyebab lainnya yaitu penyuluhan yang kurang efektif serta fiskus tidak rutin menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 23 kepada wajib pajak yang tidak patuh.

Ivanka (2021) melakukan penelitian di Medan Petisah untuk meninjau kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa hal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yakni masih banyak yang sengaja tidak melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotong, wajib pajak masih ada yang belum paham bahwa setelah memotong PPh Pasal 23 masih mempunyai kewajiban untuk

melaporkan serta menyetorkan PPh Pasal 23 yang sudah dipotong, selain itu ada juga wajib pajak yang belum mengetahui batas waktu pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 23 yang sudah dipotong.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek dan rentang waktu penelitian. Penulis melakukan penelitian di KPP Madya Balikpapan untuk meninjau kepatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 oleh perusahaan batubara pada tahun 2020 dan 2021 yang merupakan data terbaru sebelum penelitian ini dilakukan, selain itu sektor pertambangan batubara merupakan salah satu sektor terbesar dalam penerimaan pajak di KPP Madya Balikpapan (KPP Madya Balikpapan, 2019).